



## Kampus Inklusif Ramah Disabilitas: Nyata atau Sebatas Fasilitas?

<sup>1</sup>Made Sinthya Aryasthini Mahaendrayasa, <sup>2</sup>Ni Nyoman Reni Suasih,

<sup>3</sup>Ni Putu Wiwin Setyari, <sup>4</sup>Amrita Nugraheni Saraswati,

<sup>5</sup>I Gusti Agung Ayu Apsari Anandari

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

Email korespondensi: [sinthyaaryasthini@unud.ac.id](mailto:sinthyaaryasthini@unud.ac.id)

**ABSTRACT.** *An inclusive, disability-friendly campus is identified as a place that facilitates the higher education needs of people with disabilities by paying attention to usability, convenience, comfort, independence and institutional factors. The government, academics and experts related to inclusive education have developed indicators as criteria for disability-friendly campuses, including academic activities, non-academic activities, social interactions, academic infrastructure, management infrastructure, supporting infrastructure, design, social conditions, physical accessibility, information accessibility, campus institutions, and the role of government. However, the number of students with disabilities is still limited, and there is a tendency that the higher the level of education, the fewer the number of disabled students studying. The aim of this study is to develop indicators or criteria for inclusive, disability-friendly campuses in a more holistic manner so that they can increase the participation of people with disabilities to pursue higher education. The method used in analyzing and formulating strategies is through Focus Group Discussions which involving experts and also related stakeholders. So that it can be seen clearly if there is a gap between the needs of people with disabilities and campus conditions. Furthermore, the analysis was carried out using prospective analysis techniques to determine the key factors that determine interest in continuing higher education, as well as through descriptive analysis to formulate appropriate disability-friendly inclusive campus criteria. The results of the analysis show that among the inclusive indicators of a disability-friendly campus, the key factors are: (1) inclusive campus policies that clearly regulate input-output, (2) commitment to funding support from the government and third parties in funding, and (3) the existence of government commitment to providing scholarships. The government needs to consider further study in determining and establishing minimum standards for assessing disability-friendly inclusive campuses, such as the Disability-Friendly Inclusive Campus Composition Index, the third main indicator of disability-friendly inclusive campuses also needs to be considered.*

**Keywords:** *inclusive campus; disability friendly; indicators and criteria; prospective analysis; composite index*

**ABSTRAK.** Kampus inklusif yang ramah disabilitas diidentikkan sebagai tempat yang memfasilitasi kebutuhan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan faktor kegunaan, kemudahan, kenyamanan, kemandirian, dan kelembagaan. Pemerintah, akademisi, maupun para pakar terkait pendidikan inklusif telah menyusun indikator sebagai kriteria kampus ramah disabilitas, meliputi aktivitas akademik, aktivitas non-akademik, interaksi sosial, sarana prasarana akademik, sarana prasarana manajemen, sarana prasarana penunjang, desain, kondisi sosial, aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi, kelembagaan kampus, dan peran pemerintah. Namun memang jumlah mahasiswa disabilitas masih terbatas, dan terjadi kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin sedikit jumlah difabel yang menempuh pendidikan. Tujuan dari penulisan kajian ini adalah untuk mengembangkan indikator atau kriteria kampus inklusif yang ramah disabilitas secara lebih holistik sehingga dapat meningkatkan partisipasi penduduk dengan disabilitas untuk dapat menempuh pendidikan tinggi. Metode yang digunakan dalam analisis dan perumusan strategi adalah melalui Focus Group Discussion yang melibatkan para expert dan stakeholders terkait. Sehingga dapat dipotret dengan jelas bila terjadi kesenjangan antara kebutuhan difabel dengan kondisi kampus. Selanjutnya analisis dilakukan dengan teknik analisis prospektif untuk mengetahui faktor kunci yang menentukan minat melanjutkan pendidikan tinggi, serta melalui analisis deskriptif untuk merumuskan kriteria kampus inklusif ramah disabilitas yang sesuai. Hasil analisis menunjukkan bahwa diantara indikator kampus inklusif ramah disabilitas yang merupakan key factors adalah: (1) kebijakan kampus inklusif yang mengatur secara jelas dari input-output, (2) komitmen dukungan pendanaan dari pemerintah dan pihak ketiga dalam pendanaan, serta (3) adanya komitmen pemerintah dalam pemberian beasiswa. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengkaji lebih lanjut dalam merumuskan dan menetapkan standar minimal penilaian kampus inklusif ramah disabilitas, seperti Indeks Komposisi Kampus Inklusif Ramah Disabilitas. Selain itu, ketiga indikator utama kampus inklusif ramah disabilitas juga perlu mendapat perhatian.

**Kata kunci:** kampus inklusif; ramah disabilitas; indikator dan kriteria; analisis prospektif; indeks komposit

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan mensyaratkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, sudah seharusnya Pemerintah gencar berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Sehingga dengan masih adanya anak tidak sekolah (ATS) menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menempatkan program percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS).

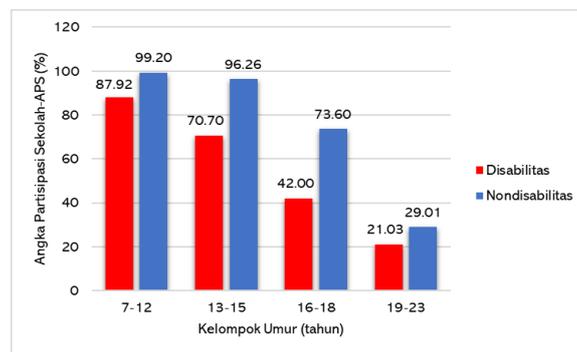
Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga mengamatkan agar semua anak terpenuhi hak sosial dan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Pemenuhan tujuan “pendidikan untuk semua” dilakukan pada semua satuan pendidikan reguler, termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus, atau disebut pendidikan yang inklusif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 dan Pasal 32, menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan (fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan yang luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2022). Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Mengingat bahwa pendidikan inklusif merupakan isu global sebagaimana tercantum dalam *United Nation-Convention on the Right of Person with Disabilities* (UNCRPD) (Chibaya *et al.*, 2021), yaitu penyelenggaraan fasilitas dan layanan pendidikan tinggi ramah disabilitas, dimana di Indonesia telah diatur dalam Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Konsistensi pemerintah dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif, bukan hanya dalam hal sarana dan prasarana yang ramah terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus, namun juga sejak proses penerimaan mahasiswa baru maupun layanan mahasiswa untuk keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus.

Kampus inklusif yang ramah disabilitas diidentikkan sebagai tempat yang memfasilitasi kebutuhan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan faktor kegunaan, kemudahan, kenyamanan, kemandirian, dan kelembagaan. Pemerintah, akademisi, maupun para pakar terkait pendidikan inklusif telah menyusun indikator sebagai kriteria

kampus ramah disabilitas, meliputi aktivitas akademik, aktivitas non-akademik, interaksi sosial, sarana prasarana akademik, sarana prasarana manajemen, sarana prasarana penunjang, desain, kondisi sosial, aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi, kelembagaan kampus, dan peran pemerintah (Hikmah *et al.*, 2020).

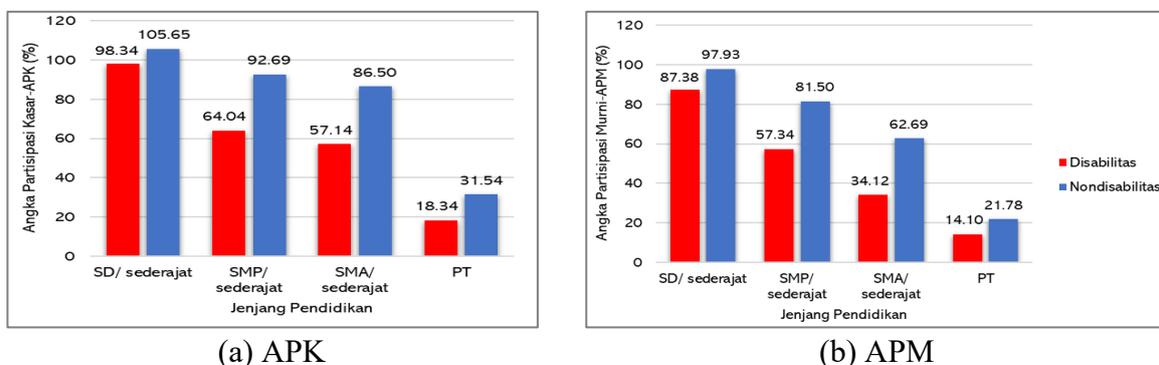
Berbagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif ternyata belum diikuti oleh peningkatan partisipasi penduduk dengan disabilitas untuk menempuh pendidikan tinggi. Statistik Pendidikan 2023 menyajikan data bahwa angka partisipasi sekolah penduduk disabilitas menurun signifikan pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi, meskipun memang pada penduduk nondisabilitas juga terjadi hal yang sama.



Gambar 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas dan Nondisabilitas Berdasarkan Kelompok Umur, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

APS merupakan persentase jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah dengan jumlah penduduk (Abdurahman *et al.*, 2022). Gambar 1 menunjukkan penurunan APS pada kelompok usia yang lebih tinggi, baik pada penduduk disabilitas maupun nondisabilitas. Namun memang angka APS disabilitas lebih rendah dibandingkan APS penduduk nondisabilitas. Untuk lebih jelasnya, maka perlu ditinjau juga dari APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni).

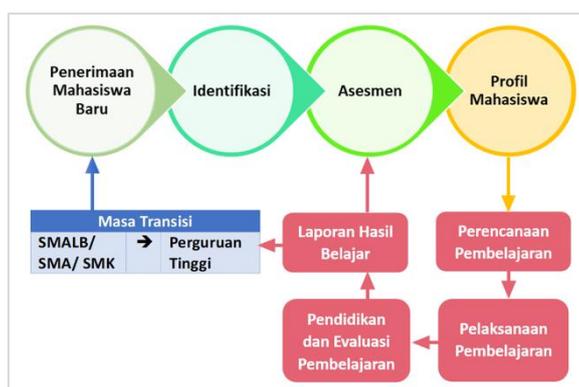


Gambar 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Disabilitas dan Nondisabilitas Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023(diolah)

APK merupakan persentase penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu, tanpa melihat ketepatan usia. Sedangkan APM membandingkan penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dengan penduduk usia yang sesuai pada jenjang tersebut (Istiqomah *et al.*, 2018). APK maupun APM penduduk disabilitas masih lebih rendah dibandingkan penduduk nondisabilitas. Bahkan secara jelas Gambar 2 menunjukkan APK dan APM yang menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Hal ini tentunya penting menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa penduduk usia sekolah saat ini merupakan target generasi emas di tahun 2045 (Awalurohmah, 2021). Berbagai penelitian menyebutkan bahwa semakin tinggi pendidikan akan berdampak positif terhadap kesempatan kerja, pendapatan, hingga pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan (Reza & Widodo, 2013; Majid Khan *et al.*, 2023).

Untuk meningkatkan partisipasi penduduk disabilitas dalam menempuh pendidikan tinggi, tentu saja kampus harus ramah disabilitas, antara lain dalam aspek manajemen kemahasiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas dan infrastruktur, serta pendanaan (Agustina *et al.*, 2020). Berkaitan dengan tridarma perguruan tinggi, tentu saja seluruh komponen kampus ramah disabilitas harus mendukung aktivitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Khuzaini & Maskur, 2019), termasuk aktivitas akademik, non-akademik, interaksi sosial, hingga aktivitas administrasi (Soleh, 2014; Susanty *et al.*, 2018). Sehingga kampus ramah disabilitas perlu mengatur seluruh aspek tersebut agar alur pelaksanaan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan tinggi terlaksana dengan baik.



Gambar 3 Framework Alur Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Jenjang Pendidikan Tinggi

Sumber: diadopsi dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (2022)

Tujuan dari penulisan kajian ini adalah untuk mengembangkan indikator atau kriteria kampus inklusif yang ramah disabilitas secara lebih holistik sehingga dapat meningkatkan partisipasi penduduk dengan disabilitas untuk dapat menempuh pendidikan tinggi.

## 2. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian/penelitian. Disarankan pada bagian ini dimulai dari pendekatan penelitian, variabel-variabel yang digunakan dan data yang dibutuhkan, sumber data dan metode pemilihannya, metode pengumpulan dan analisis data, serta batasan penelitian. Panjang bagiannya adalah 10 persen dari panjang keseluruhan naskah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-prospektif, dimana penelitian prospektif fokus untuk meneliti peristiwa yang belum terjadi sehingga tepat digunakan dalam perumusan kebijakan (Suasih *et al.*, 2024).

Metode yang digunakan dalam analisis dan perumusan strategi adalah melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para expert maupun stakeholders terkait. Sehingga dapat dipotret dengan jelas bila terjadi kesenjangan antara kebutuhan mahasiswa disabilitas dengan kondisi kampus.

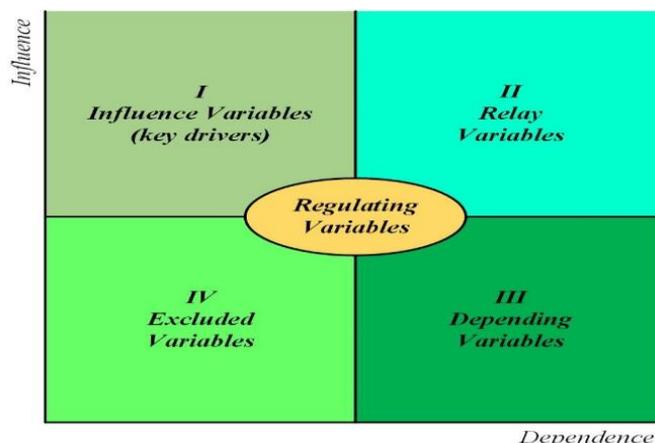
Berdasarkan hasil literature review serta FGD, maka dapat dirumuskan variabel yang diidentifikasi sebagai kriteria/indikator terkait pendidikan inklusif dalam mewujudkan kampus ramah disabilitas.

Tabel 1 Identifikasi Variabel/Kriteria/Indikator Kampus Inklusif Ramah Disabilitas

| <b>Kriteria/Theme</b>        | <b>Indikator</b>   | <b>Label</b> |
|------------------------------|--|--------------|
| 1. Penerimaan mahasiswa baru | Jalur penerimaan mahasiswa baru memperhatikan kebutuhan calon mahasiswa disabilitas  | 1.maba       |
|                              | Kegiatan orientasi yang ramah disabilitas  | 1.orientas   |
| 2. Aktivitas akademik        | Penyesuaian pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas di kelas reguler   | 2.pemb.kls   |
|                              | Tenaga pengajar yang ramah disabilitas   | 2.dosen      |
|                              | Fasilitas pembelajaran yang ramah disabilitas (buku, software, peralatan)  | 2.fas.blj    |
|                              | Metode belajar yang ramah disabilitas  | 2.metode     |
|                              | Tersedia pendamping bagi mahasiswa disabilitas apabila kesulitan mengikuti aktivitas akademik  | 2.pendampg   |
|                              | Bentuk evaluasi belajar yang memperhatikan mahasiswa disabilitas   | 2.eval.blj   |
|                              | Penilaian hasil belajar dengan rubrik yang memperhatikan mahasiswa disabilitas   | 2.nilai      |
| 3. Aktivitas non-akademik    | Kegiatan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang dapat diikuti mahasiswa disabilitas  | 3.ukm        |
| 4. Interaksi sosial          | Suasana kampus kondusif tidak membedakan (non-diskriminatif) dalam mengakses semua fasilitas dan sarpras   | 4.no-diskr   |
|                              | Ruang interaksi antar mahasiswa yang memperhatikan kebutuhan disabilitas   | 4.inter-mhs  |
|                              | Ruang interaksi mahasiswa-dosen-tendik yang memperhatikan kebutuhan disabilitas  | 4.mhs-dos    |
| 5. Sarpras penunjang         | Terdapat sarpras penunjang yang menyediakan ruang dan desain ramah disabilitas   | 5.sarpras    |
|                              | Terdapat labelisasi pada sarpras khusus disabilitas  | 5.label      |
|                              | Kemudahan akses bagi sarpras penunjang khusus disabilitas  | 5.akses      |
|                              | Prinsip <i>universal design</i> pada fasilitas publik, termasuk untuk penyandang disabilitas ( <i>guiding block, lift</i> dengan <i>braile</i> ) | 5.uni.dsg    |

| Kriteria/Theme                          | Indikator   | Label      |
|---|---|------------|
| 6. Kelembagaan kampus                   | Adanya kebijakan kampus yang mengatur input-proses-output yang menjamin hak mahasiswa disabilitas                   | 6.policy   |
|   | Adanya partisipasi mahasiswa disabilitas dalam perumusan kebijakan pengembangan kampus ramah disabilitas            | 6.partisip |
| 7. Dukungan pemerintah dan stakeholders | Adanya komitmen dukungan pemerintah dalam bentuk pendanaan penyediaan fasilitas                                     | 7.dana     |
|   | Adanya komitmen dukungan pemerintah dalam bentuk beasiswa   | 7.beasiswa |
|   | Adanya peran pemerintah setempat dalam penyediaan fasilitas ramah disabilitas terutama di sekitar lingkungan kampus | 7.fasilita |

Faktor-faktor sebagaimana Tabel 1 selanjutnya dibahas dan dinilai dalam FGD dan hasilnya dijadikan sebagai input analisis prospektif-MICMAC. MICMAC atau Matrix of Cross Impact Multiplications Applied to a Classification, diperkenalkan oleh (Godet, 1994) sebagai bagian dari “strategic foresight” yang berfokus pada analisis-analisis skenario pembangunan, termasuk sustainable development (Fauzi, 2019). Prinsip teknik MICMAC adalah membantu untuk: (1) mengidentifikasi variabel-variabel utama yang bersifat *influential* (memengaruhi) dan *dependent* (dipengaruhi) yang esensial bagi suatu sistem; (2) memetakan hubungan antarvariabel dan relevansi variabel-variabel tersebut dalam menjelaskan suatu sistem.; (3) mengungkapkan rantai sebab akibat dari suatu sistem (de Almeida & de Moraes, 2013). Variabel-variabel dalam MICMAC dikelompokkan dalam empat kuadran berdasarkan kategori ketergantungan (dependence) dan pengaruh (influence) seperti Gambar 4.



Gambar 4 Pemetaan Variabel Dalam Analisis MICMAC

Sumber: (Fauzi, 2019)

Kuadran I menunjukkan variabel yang berpengaruh tinggi dan ketergantungan rendah, sehingga disebut juga sebagai key drivers. Sedangkan kuadran II merupakan variabel dengan pengaruh dan sekaligus ketergantungan yang tinggi. Selanjutnya kuadran III merupakan variabel dengan ketergantungan yang tinggi namun pengaruhnya lemah. Sementara kuadran IV cenderung lemah dampaknya terhadap sistem karena merupakan variabel dengan pengaruh

dan ketergantungan yang rendah (Fauzi, 2019). Selain itu, di bagian tengah terdapat regulating variables yang cenderung lebih mudah diatur.

Selanjutnya hasil analisis MICMAC dijadikan dasar dalam penyusunan Indeks Komposit Kampus Inklusif Ramah Disabilitas (IKASITAS) yang dapat dijadikan sebagai instrumen pengukuran kampus inklusif. Adapun metode yang digunakan dalam agregasi dari bobot dan indikator penyusunan IKASITAS adalah metode agregasi linier sebagai berikut (Puslitbangwas BPKP, 2021):

$$CI_c = \sum_{q=1}^q w_q x_{qc}$$

dimana:

$w_q$  adalah bobot ke- $q$

$x_{qc}$  adalah indikator ke- $q$  pada unit analisis  $c$

$CI_c$  adalah indeks komposit unit analisis  $c$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### ***Milestone* Kampus Inklusif Ramah Disabilitas di Indonesia**

Masyarakat dengan pendidikan tinggi merupakan salah satu kunci utama pembangunan melalui sumberdaya manusia berkualitas. Model pendidikan di Indonesia bagi penyandang disabilitas dikenal dengan model pendidikan “segregatif”, yaitu pelaksanaan pendidikan melalui sekolah luar biasa atau sekolah khusus. Model ini menempatkan siswa penyandang disabilitas dalam lingkungan dengan sarpras yang sesuai kebutuhan mereka dan mudah diakses (Rizky, 2015). Meskipun model segregatif cenderung memudahkan bagi siswa disabilitas, namun ternyata model ini membuat para siswa kurang siap ketika kembali ke lingkungan masyarakat karena pendidikan yang ditempuh terpisah dari masyarakat nondisabilitas. Kondisi itulah yang melatarbelakangi berkembangnya konsep pendidikan inklusif di Indonesia.

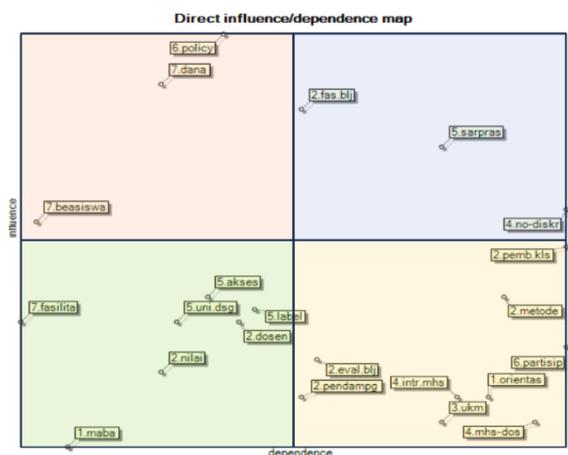
Sebelum adanya goal pendidikan untuk semua dalam SDGs, UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) sesungguhnya sudah menyebutkan secara eksplisit bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Implikasinya, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Sisdiknas maupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur tentang peserta didik berkebutuhan khusus. Secara lebih spesifik, pendidikan inklusif bagi peserta didik dengan disabilitas diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.

Mahasiswa disabilitas di negara maju telah lama memperoleh layanan pendidikan inklusif yang holistik. Sementara pendidikan inklusif jenjang perguruan tinggi di Indonesia baru diatur melalui Permendiknas Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Layanan Pendidikan Khusus, dan/atau Layanan Pembelajaran Khusus di Pendidikan Tinggi, yang diperbaharui dengan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Regulasi tersebut memberikan kewenangan bagi pemimpin perguruan tinggi untuk menyusun pedoman lebih lanjut mengenai pendidikan layanan khusus.

Saat ini beberapa perguruan tinggi telah meng-klaim diri sebagai “Kampus Inklusif” dan/atau “Kampus Ramah Disabilitas” dengan membentuk unit khusus yang memfasilitasi mahasiswa disabilitas ataupun dengan membuat kebijakan sebagai acuan pendidikan inklusif bagi mahasiswa disabilitas. Universitas Negeri Surabaya (UNESA), mengembangkan Matrik Inklusi Disabilitas Unesa (UDIM) sebagai parameter tingkat aksesibilitas penyandang disabilitas, sehingga tahun 2013 Unesa mendapatkan penghargaan kampus inklusif dari kementerian. Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), mengembangkan UNS Inclusion Metric termasuk menetapkan SOP terkait. Beberapa perguruan tinggi lain juga mengembangkan berbagai metrics atau mengembangkan indikator pendidikan inklusif yang dominan fokus pada aksesibilitas fasilitas dan sarpras. Namun apakah rumitnya pengukuran tersebut telah mampu secara tidak langsung meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan tinggi? Hal ini yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah untuk agar fasilitas serta indikator tersebut mampu diikuti peningkatan partisipasi.

### Pemetaan Kriteria Kampus Inklusif

Hasil analisis MICMAC memetakan berbagai kriteria kampus inklusif pada influence-dependence map (Gambar 5).



Gambar 5 Direct Influence/Dependence Map

Berdasarkan Gambar 5, maka posisi indikator kampus inklusif ramah disabilitas disajikan pada Tabel 2, dan memang tidak terdapat variabel di bagian tengah sebagai *regulating variables*.

Tabel 2 Tipologi Indikator Berdasarkan Influence/Dependence Map

| <i>Influence Variables</i>  | <i>Relay Variables</i>   | <i>Depending Variables</i>  | <i>Exclude Variables</i>   |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya kebijakan kampus yang mengatur input-proses-output yang menjamin hak mahasiswa disabilitas [6.policy]</li> <li>▪ Adanya komitmen dukungan pemerintah dan pihak ketiga dalam bentuk pendanaan penyediaan fasilitas [7.dana]</li> <li>▪ Adanya komitmen dukungan pemerintah dalam bentuk beasiswa [7.beasiswa]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas pembelajaran yang ramah disabilitas (buku, software, peralatan) [2.fas.blj]</li> <li>▪ Terdapat sarpras penunjang yang menyediakan ruang dan desain ramah disabilitas [5.sarpras]</li> <li>▪ Suasana kampus kondusif tidak membedakan (non-diskriminatif) dalam mengakses semua fasilitas dan sarpras [4.no-diskr]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyesuaian pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas di kelas reguler [2.pemb.kls]</li> <li>▪ Metode belajar yang ramah disabilitas [2.metode]</li> <li>▪ Adanya partisipasi mahasiswa disabilitas dalam perumusan kebijakan pengembangan kampus ramah disabilitas [6.partisip]</li> <li>▪ Bentuk evaluasi belajar yang memperhatikan mahasiswa disabilitas [2.eval.blj]</li> <li>▪ Ruang interaksi antar mahasiswa yang memperhatikan kebutuhan disabilitas [4.inter-mhs]</li> <li>▪ Kegiatan orientasi yang ramah disabilitas [1.orientas]</li> <li>▪ Tersedia pendamping bagi mahasiswa disabilitas apabila kesulitan mengikuti aktivitas akademik [2.pendampg]</li> <li>▪ Kegiatan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang dapat diikuti mahasiswa disabilitas [3.ukm]</li> <li>▪ Ruang interaksi mahasiswa-dosen-tendik yang memperhatikan kebutuhan disabilitas [4.mhs-dos]</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemudahan akses bagi sarpras penunjang khusus disabilitas [5.akses]</li> <li>▪ Adanya peran pemerintah setempat dalam penyediaan fasilitas ramah disabilitas terutama di sekitar lingkungan kampus [7.fasilita]</li> <li>▪ Prinsip <i>universal design</i> pada fasilitas publik, termasuk untuk penyandang disabilitas [5.uni.dsg]</li> <li>▪ Terdapat labelisasi pada sarpras khusus disabilitas [5.label]</li> <li>▪ Tenaga pengajar yang ramah disabilitas [2.dosen]</li> <li>▪ Penilaian hasil belajar dengan rubrik yang memperhatikan mahasiswa disabilitas [2.nilai]</li> <li>▪ Jalur penerimaan mahasiswa baru memperhatikan kebutuhan calon mahasiswa disabilitas [1.maba]</li> </ul> |

### Pembentukan Indeks Komposit Kampus Inklusif Ramah Disabilitas (IKASITAS)

Hasil mapping tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Indeks Komposit Kampus Inklusif Ramah Disabilitas (IKASITAS). Adapun perhitungan pengembangan IKASITAS disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Pembentukan Indeks Komposit Kampus Inklusif Ramah Disabilitas (IKASITAS)

| Kriteria/Theme                                     | Label Indikator | Kuadran MICMAC | Nilai Kuadran | Bobot Indikator | Bobot Kriteria |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1. Penerimaan mahasiswa baru (KITAS <sub>1</sub> ) | 1.maba          | 3              | 2             | 4.35            | 6.52           |
|  | 1.orientas      | 4              | 1             | 2.17            |                |
| 2. Aktivitas akademik (KITAS <sub>2</sub> )        | 2.pemb.kls      | 3              | 2             | 4.35            | 28.26          |
|  | 2.dosen         | 4              | 1             | 2.17            |                |
|  | 2.fas.blj       | 2              | 3             | 6.52            |                |
|  | 2.metode        | 3              | 2             | 4.35            |                |
|  | 2.pendampg      | 3              | 2             | 4.35            |                |
|  | 2.eval.blj      | 3              | 2             | 4.35            |                |
|  | 2.nilai         | 4              | 1             | 2.17            |                |
| 3. Aktivitas non-akademik (KITAS <sub>3</sub> )    | 3.ukm           | 3              | 2             | 4.35            | 4.35           |
| 4. Interaksi sosial (KITAS <sub>4</sub> )          | 4.no-diskr      | 2              | 3             | 6.52            | 15.22          |
|  | 4.inter-mhs     | 3              | 2             | 4.35            |                |
|  | 4.mhs-dos       | 3              | 2             | 4.35            |                |
| 5. Sarpras penunjang (KITAS <sub>5</sub> )         | 5.sarpras       | 2              | 3             | 6.52            | 13.04          |
|  | 5.label         | 4              | 1             | 2.17            |                |
|  | 5.akses         | 4              | 1             | 2.17            |                |
|  | 5.uni.dsg       | 4              | 1             | 2.17            |                |
| 6. Kelembagaan kampus (KITAS <sub>6</sub> )        | 6.policy        | 1              | 4             | 8.70            | 13.04          |
|  | 6.partsip       | 3              | 2             | 4.35            |                |
| 7. Dukungan pemerintah (KITAS <sub>7</sub> )       | 7.dana          | 1              | 4             | 8.70            | 19.57          |
|  | 7.basiswa       | 1              | 4             | 8.70            |                |
|  | 7.fasilita      | 4              | 1             | 2.17            |                |
| Jumlah   |                 |                |               | 100             | 100            |

Sehingga berdasarkan perhitungan sebagaimana disajikan pada Tabel 3, maka dapat ditulis persamaan IKASITAS sebagai berikut:

$$IKASITAS = (6,52 \times KITAS_1) + (28,26 \times KITAS_2) + (4,35 \times KITAS_3) + (15,22 \times KITAS_4) + (13,04 \times KITAS_5) + (13,04 \times KITAS_6) + (19,57 \times KITAS_7)$$

Penyusunan IKASITAS tentunya dapat semakin dikembangkan sehingga dapat memastikan terpenuhinya standar pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan tinggi. Pertimbangan yang dapat digunakan adalah kriteria yang harus bersifat holistik dan tidak sebatas fasilitas, namun agar mampu membuat mahasiswa disabilitas merasa nyaman tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan yang diperoleh.

#### 4. SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan kampus inklusif ramah disabilitas tentu perlu ditetapkan kriteria serta pengukurannya. Beberapa kriteria utama yang diidentifikasi yaitu: (1) penerimaan mahasiswa baru; (2) aktivitas akademik; (3) aktivitas non-akademik; (4) interaksi sosial; (5) sarpras penunjang; (6) kelembagaan kampus; (7) dukungan pemerintah dan stakeholders. Hasil analisis menunjukkan bahwa diantara indikator kampus inklusif ramah disabilitas yang merupakan key factors adalah: (1) kebijakan kampus inklusif yang mengatur secara jelas dari

inputi-output, (2) komitmen dukungan pendanaan dari pemerintah dan pihak ketiga dalam pendanaan, serta (3) adanya komitmen pemerintah dalam pemberian beasiswa.

Sebagai tindak lanjut hasil kajian, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengkaji lebih lanjut dalam merumuskan dan menetapkan standar minimal penilaian kampus inklusif ramah disabilitas, seperti IKASITAS. Hal ini sebagai standar minimal yang masih dapat dikembangkan standar tambahan yang lebih tinggi di masing-masing perguruan tinggi. Hasil perhitungan IKASITAS tentunya dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan bantuan pendanaan dalam rangka perbaikan fasilitas maupun aktivitas akademik dan non-akademik dalam mewujudkan kampus inklusif. Selain itu, ketiga indikator utama kampus inklusif ramah disabilitas juga perlu mendapat perhatian. Diperlukan panduan dalam penyusunan kebijakan kampus inklusif sejak proses input-output yang jelas di tiap perguruan tinggi. Selain penyusunan kebijakan tersebut, perguruan tinggi juga perlu diarahkan untuk memanfaatkan dana dari pemerintah maupun stakeholders (seperti alumni dan NGO) untuk keperluan fasilitas disabilitas maupun penguatan layanan bagi disabilitas. Ketika kampus inklusif telah terbentuk, maka tentu Pemerintah bersama-sama stakeholders juga perlu memikirkan upaya peningkatan minat penduduk disabilitas lulusan SMA/ sederajat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Salah satunya adalah melalui pemberian beasiswa. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penduduk disabilitas lulusan SMA/ sederajat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, sehingga dapat dilakukan treatment pada faktor-faktor yang penting.

## PUSTAKA ACUAN

- Abdurahman, A., Nahdiatuzzakiah, & Risal, S. (2022). Analysis of School Participation Rates and Their Implications on Poverty Level in Mediation of Per Capita Income in Hulu Sungai Utara Regency. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(6), 917–930. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i6.669>
- Agustina, D., & Karwan, D. H. (2020). *University Management In Making Disability Friendly Campus*. IV(Ii), 28–31.
- Awalurohmah, U. N. (2021). Eksistensi Mahasiswa Menyongsong Era Indonesia Emas. In *Akademia Pustaka*. [www.akademiapustaka.com](http://www.akademiapustaka.com)
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pendidikan 2023. *Badan Pusat Statistik*, 12, i–242. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/25/a80bdf8c85bc28a4e6566661/statistik-pendidikan-2022.html>
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan-Kemendikbudristek. (2022). Panduan Pendidikan Inklusif. In *Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan*,

*Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>

- Chibaya, G., Govender, P., & Naidoo, D. (2021). United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities (UNCRPD) Implementation: Perspectives of Persons with Disabilities in Namibia. *Occupational Therapy International*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/6693141>
- de Almeida, M. F. L., & de Moraes, C. A. C. (2013). Diffusion of emerging technologies for sustainable development: Prospective assessment for public policies. *Journal of Technology Management and Innovation*, 8(SPL.ISS.2), 228–238. <https://doi.org/10.4067/s0718-27242013000300021>
- Fauzi, A. (2019). *Teknik Analisis Keberlanjutan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Godet, M. (2019). From Anticipation to Action. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Hikmah, T. L., Yusuf, M., & Sianturi, R. S. (2021). Kriteria Pengembangan Kampus Ramah Disabilitas di Universitas Airlangga. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.55409>
- Istiqomah, A., Sukidin, & Suharso, P. (2018). Analisis Partisipasi Pendidikan Pada Masyarakat Miskin Dusun Gumuk Limo Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 12(2), 227–235. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8553>
- Khuzaini, K., & Maskur, M. (2019). Dimensi Pelayanan Pada Perguruan Tinggi: Studi Pada Mahasiswa Pascasarjana. *At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 66–72. <https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1803>
- Majid Khan, Kiran Sarwar, & Gul Rukh Niazi. (2023). The Impact of Education System on Economic Growth: An Empirical Evidence from Developing Economy. *Administrative and Management Sciences Journal*, 1(2), 94–102. [https://doi.org/10.59365/amsj.1\(2\).2023.38](https://doi.org/10.59365/amsj.1(2).2023.38)
- Puslitbangwas BPKP. (2021). *Pedoman Praktis Membangun Indeks Komposit*, Nomor: LP-008/LB/2021 (Tanggal: 29 Maret 2021). Jakarta: Puslitbangwas BPKP.
- Reza, F., & Widodo, T. (2013). The Impact of Education on Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada)*, 28(1), 23–44.
- Rizky, U.F. (2015). Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas (Studi tentang Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya). *Indonesian Journal of Disability Studies*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2015.02.01.04>
- Soleh, A. (1970). Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.1-30>

- Suasih, N. N. R., Saputra, I. M. Y., Mustika, M. D. S., & Widiani, N. M. N. (2024). Waste Management Policy in Bali Province, Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2677. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2677>
- Susanty, A., Santoso, H., & Nursyachbani, P. (2018). Analisis Jenis Layanan Pendidikan Dan Non Pendidikan Yang Penting Bagi Peningkatan Kepuasan Mahasiswa (Studi Kasus: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro). *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 13(1), 7. <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.7-16>